

KOMITMEN PIMPINAN MPR



TUNTAS

BERANTAS KORUPSI

KUTIPAN MEDIA

The
LIMITED
EDITION

SITI FAUZIAH

P29640429111



— TUNTAS —

BERANTAS KORUPSI

KUTIPAN MEDIA

SITI FAUZIAH

TUNTAS BERANTAS KORUPSI

© 2017 Biro Humas Sekretariat Jendral MPR RI

Email: perpustakaan@mpr.go.id

Pengarah: Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Ketua Editor : Siti Fauziah, S.E., M.M.

Ketua Tim Produksi : Roosiah Yuniarsih

Anggota Tim Produksi:

Taufik Jatmiko, Budi Muliawan,

Prominensa, Dwiko Saptohadi, Luki, Devira, Neyna

Cover: Common Right

Setter: N.S Mariyam

ISBN: 978-602-73483-2-5

Edisi Pertama, Cetakan Pertama (2017)

KATA PENGANTAR

Memberantas Korupsi tidak bisa dalam sehari dua hari, segenap Pimpinan MPR menyuarakan ‘Anti Korupsi’ hampir dalam setiap keseharian dan setiap tindakan. Hal tersebut terekam di dalam catatan media nasional, media lokal, televisi dan radio. Beberapa rekaman itu dituturkan kembali secara utuh di dalam isi buku ini.

Rekaman kegiatan bersama Pimpinan MPR, Mahkamah Konstitusi, dan KPK yang melibatkan Perguruan Tinggi yang dirintis sejak tahun lalu di Makasar tepatnya di Universitas Hasanudin juga termuat beberapa di sini.

Semoga kutipan media ini bermanfaat mengingatkan kita semua betapa pentingnya tindak lanjut dari komitmen bersama memberantas korupsi. Bukan sekedar komitmen tetapi mengamalkannya dalam keseharian yang pada gilirannya direkam dengan kritis oleh khalayak secara perorangan maupun komunitas dan juga media. Karena ketika semua pihak menjalankan komitmen anti korupsi dengan sebenarnya maka berbagai Komunitas Anti Korupsi pun datang mendekat dan mendukung gerakan kebaikan yang kita bersama lakukan.

Pada akhirnya buku kecil ini tetap mempunyai banyak kekurangan di sana dan sini. Buku ini diharapkan dapat terbit dan terbarukan dalam setiap perhelatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi. Segala kritik dan saran penyempurnaan buku ini silakan disampaikan ke perpustakaan@mpr.go.id.

Jakarta, Nopember 2017

Siti Fauziah

Biro Humas Setjen MPR RI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Tuntaskan Perkara E-KTP, Ketua MPR Minta KPK Profesional	1
Tegaskan Komitmen Anti Korupsi dan Implementasikan Pancasila	3
Korupsi Dan Kesenjangan Si Kaya Dengan Si Miskin	7
Korupsi Dipicu Gaya Hidup Hedonisme	9
MPR RI, MK RI, KPK Deklarasi Anti-Korupsi	11
Korupsi Harus Dihentikan	13
Ketua MPR Hadiri Festival Konstitusi Dan Antikorupsi	17
Ketua MPR Bersama Ketua MK dan KPK Tandatangani Deklarasi Anti Korupsi.....	19

Ketua MPR Buka Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Universitas Hasanudin	23
Tiga Pimpinan Institusi Negara Deklarasikan Anti Korupsi.....	27
Ketua MPR Terima Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi	31
Madrasah Anti Korupsi	35
Akhiri Aktivitas Korupsi dalam Demokrasi.....	37
Ketua MPR Ditemui Koalisi Antikorupsi: Saya Ikut KPK	39
Rakyat Dapat Cegah Korupsi	41
Ketua MPR, Ketua MK dan Ketua KPK Tandatangani Deklarasi Anti Korupsi	45
Tolak Revisi UU KPK, Koalisi Antikorupsi Minta Dukungan MPR	49
Pemberantasan Korupsi Harus Keroyokan.....	53
Perkuat KPK Ketimbang Bentuk Densus Tipikor.....	55
Referensi	57
Indeks	59
Tentang Penulis	61

TUNTASKAN PERKARA E-KTP, KETUA MPR MINTA KPK PROFESIONAL

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dinilai tidak perlu memeriksa anggota dewan yang disebut terlibat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Persoalan tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, semua pihak harus mendukung KPK dalam menuntaskan perkara yang merugikan negara hingga triliunan itu. Menurutnya uang yang menguap dalam pengadaan e-KTP itu adalah uang rakyat.¹

"Kita percayakan saja pada KPK," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Namun, Ketua MPR ini berharap KPK jangan tebang pilih dalam menuntaskan perkara tersebut. Dia

¹ <https://nasional.sindonews.com/read/1189883/13/tuntaskan-perkara-e-ktp-ketua-mpr-minta-kpk-profesional-1489985553>

mengingatkan, KPK sebagai lembaga antikorupsi seharusnya bekerja secara profesional.

*"Karena ini kan uang rakyat yang ingin diniatkan begitu bagus untuk menjadikan kita ini **single identity**, sehingga lebih mudah dan tidak ada lagi double KTP semua bisa tertib," ucapnya.*

Sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR. Ketua Umum Partai Golkar itu dilaporkan terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek pengadaan e-KTP.

TEGASKAN KOMITMEN ANTI KORUPSI DAN IMPLEMENTASIKAN PANCASILA

Badan Kerjasama Masyarakat Sumatera Bagian Selatan (BKMSS) menyatakan komitmen terhadap pencegahan anti korupsi dan mengupayakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keutuhan NKRI. Hal ini diungkapkan oleh ketua BKMSS – Jimly Asshiddiqie² pada sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang diselenggarakan oleh 2 BKMSS bertempat di gedung Nusantara 5.

Jimly mengatakan BKMSS yang terdiri dari lima provinsi, meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Disamping itu juga, memiliki modal sejarah dan warisan sejarah, berupa terdapatnya kerajaan Sriwijaya yang membentang di

² <http://trijayafmplg.net/berita/2017/03/bkmss-komitmen-anti-korupsi-dan-implementasikan-pancasila/> tuntas brantas korupsi !! dari !6 43!



lima wilayah Sumbagsel. Ini merupakan modal penting bagi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila. “Melalui organisasi BKMSS ini, masyarakat di lima wilayah dapat terlibat aktif dalam mewujudkan keutuhan NKRI dan pemerataan keadilan,”harapnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua MPR RI – Zuklifili Hasan, Kepala Daerah dari lima provinsi yang terdapat di Sumbagsel, di mana Sumsel dihadiri oleh Wakil Gubernur Ishak Mekki, anggota DPR RI dapil Sumbagsel, dan anggota DPD RI.

Sementara itu, dalam sambutannya pada acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Zulkifli Hasan menegaskan Pancasila harus menjadi perilaku budaya manusia Indonesia dan ideologi bangsa Indonesia.

Jika hal ini menjadi nilai & pandangan hidup bangsa Indonesia, maka akan timbul rasa saling percaya pada rakyat.

“Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun dapat terwujud, dan perbedaan serta potensi lokal dapat dikembangkan setinggi-tingginya. Bahkan ekonomi lokal dapat menjadi kekuatan ekonomi pusat,”terang Zuklifili.

Pada kesempatan ini juga, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan anti korupsi, oleh lima kepala daerah sumbagsel dengan Ketua BKMSS dan Ketua MPR RI. Hal ini sebagai pernyataan sikap yang konsisten terhadap upaya pencegahan korupsi.

Usai penandatanganan komitmen bersama, masing-masing kepala daerah di wilayah Sumbagsel, menyampaikan pemaparan tentang potensi dan kemajuan masing-masing provinsi. Pemaparan didahului oleh Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Kemudian, Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, dalam paparannya menyampaikan bahwa Sumsel menyatakan kesiapan sebagai pelaksanaan Asian Games 2018, terlebih dengan penambahan 3 cabor Asian Games 2018, yang dilaksanakan di Palembang.

Mantan Bupati OKI ini menambahkan, kesiapan dalam pelaksanaan Asian Games 2018, didukung dengan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan LRT dengan rute Jakabaring-Bandara SMB II, pembangunan jalan toll ruas Palembang -Indralaya, pembangunan *fly over* simpang Kertapati – Indralaya, serta

pembangunan *fly over* simpang bandara. Bahkan, tak ayal Sumsel siap untuk pelaksanaan olahraga tingkat international – Moto GP. Selain itu, untuk mengantisipasi karhutlah, Sumsel telah membentuk desa peduli api.

KORUPSI DAN KESENJANGAN SI KAYA DENGAN SI MISKIN



Salah satu tuntutan reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pemerintahan yang bersih. Namun setelah reformasi berlangsung 17 tahun, praktik KKN masih berlangsung .

“Pemberantasan korupsi hampir berjalan di tempat,” kata Wakil

Ketua MPR Mahyudin saat menjadi pembicara dalam sosialisasi Empat Pilar MPR dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia dengan tema “Komitmen Pemimpin dalam Pemberantasan Korupsi” di Aula Kantor Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin malam³ (21/11/2016).

3 <https://news.detik.com/berita/d-3351928/wakil-ketua-mpr-bicara-soal-korupsi-dan-kesenjangan-si-kaya-dengan-si-miskin>

Sosialisasi ini merupakan kerjasama MPR dengan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Kaltim. Mahyudin menjelaskan korupsi yang marak terkait juga dengan demokrasi politik. Sesungguhnya demokrasi bisa berjalan baik di negaranegara maju yang pendapatan per kapita penduduknya sudah tinggi. Negara-negara maju seperti di Eropa atau Amerika pendapatan per kapita penduduknya sudah 40 ribu dolar AS. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia baru 45 juta per tahun. “Itu pun masih terjadi kesenjangan di Indonesia yang tajam ditandai dengan indeks gini ratio 0,42. Artinya terjadi jurang antara mereka yang kaya dan miskin,” jelas Mahyudin.

Di mana keterkaitannya demokrasi dan korupsi? Mahyudin mencontohkan kalau di AS karena warganya kaya maka calon presiden disumbang (donasi dari konstituen) tapi di Indonesia calon kepala daerah harus mengeluarkan uang untuk konstituennya.

“Karena beratnya pada saat pencalonan itulah kepala daerah (pemimpin) tersangkut korupsi. Jadi komitmen tidak melakukan korupsi tinggal komitmen,” ujarnya.

Mengapa banyak kepala daerah dan anggota dewan tertangkap KPK? “Karena biaya politik yang besar. Ini adalah dampak dari sistem pemilihan langsung. Sebenarnya kita tidak siap dengan demokrasi (pemilihan) langsung karena biayanya besar,” ucap Mahyudin.

Selain biaya politik yang besar, kata Mahyudin, korupsi juga disebabkan karena gaya hidup hedonisme. “Gaya hidup hedonisme ini membuat banyak pemimpin dan penyelenggara negara tersangkut korupsi,” ujar Mahyudin. (fjp/fjp)

KORUPSI DIPICU GAYA HIDUP HEDONISME



Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan perilaku korupsi dipicu oleh berbagai hal, di antaranya gaya hidup hedonisme dan biaya politik yang besar. “Gaya hidup hedonisme ini membuat banyak pemimpin dan penyelenggara negara tersangkut korupsi,” katanya⁴ dalam sosialisasi Empat Pilar MPR

RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dilansir keterangan tertulis, Selasa.

Sementara untuk biaya politik yang besar, kata Mahyudin, merupakan dampak dari sistem pemilihan langsung kepala daerah atau wakil rakyat.

⁴ <https://m.antaranews.com/berita/597523/wakil-ketua-mpr-korupsi-dipicu-gaya-hidup-hedonisme>

"Ini adalah dampak dari sistem pemilihan langsung. Sebenarnya kita tidak siap dengan demokrasi (pemilihan) langsung karena biayanya besar," ucapnya.

Mahyudin menjelaskan, korupsi juga terkait dengan demokrasi politik. Sesungguhnya demokrasi bisa berjalan baik di negara-negara maju yang pendapatan per kapita penduduknya sudah tinggi. Ia mengatakan, negara-negara maju seperti di Eropa atau Amerika, pendapatan per kapita penduduknya mencapai 40 ribu dolar AS. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia baru Rp45 juta per tahun.

"Itu pun masih terjadi kesenjangan di Indonesia yang tajam ditandai dengan indeks gini ratio 0,42. Artinya terjadi jurang antara mereka yang kaya dan miskin," kata politisi Partai Golongan Karya itu.

Mahyudin mencontohkan pemilihan umum di Amerika Serikat, di mana calon presiden mendapatkan donasi dari konstituen, sementara di Indonesia, calon kepala daerah harus mengeluarkan uang untuk konstituennya.

"Karena beratnya pada saat pencalonan itulah kepala daerah (pemimpin) tersangkut korupsi. Jadi komitmen tidak melakukan korupsi tinggal komitmen," tuturnya.

MPR RI, MK RI, KPK DEKLARASI ANTI-KORUPSI

Universitas Hasanuddin (Unhas) dipilih menjadi tempat pelaksanaan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Tiga pimpinan lembaga negara tersebut secara bersama-sama menghadiri kegiatan yang dirangkaikan dengan Dialog Kampus di Baruga AP Pettarani Kampus Tamalanrea Unhas, Senin (24/10/2016).



Sebelum bertindak sebagai narasumber dalam Dialog Kampus tersebut Ketua MPR RI, Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.,⁵ Ketua KPK, Ir. Agus Rahardjo, M.S.M., Ketua MK RI, Prof. Dr. Arief Hidayat,

⁵ <http://makassar.tribunnews.com/2016/10/24/ketua-mpr-ri-mk-ri-kpk-deklarasi-anti-korupsi-di-unhas>

S.H., M.S. mengunjungi Pameran di Pelatarab Baruga AP Pettarani Unhas.

Tiga pimpinan lembaga negara tersebut disambut Rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A sekaligus mendampingi saat berkeliling diacara pameran. Prof. Dwia mengatakan dipilihnya Unhas sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut sudah tepat karena Unhas sejak awal mendeklarasikan diri sebagai kampus bebas korupsi.

“Ini suatu kebanggan tiga pimpinan lembaga negara datang secara bersamaan di kampus kita, dipilihnya Unhas untuk deklarasi sudah tepat karena dari dulu kita deklarasikan Unhas Kampus bebas korupsi,” tutur Prof. Dwia saat menyambut ketiga pimpinan lembaga negara tersebut.

KORUPSI HARUS DIHENTIKAN



Tarian perang hideng yang dibawakan enam mahasiswa Sanggar Ammapai menyambut kedatangan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIKOM) Uyelindo, Jalan Perintis Kemerdekaan Kayu Putih, Kota

Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 26 Oktober 2017.

Begitu melangkah menuju aula STIKOM, Mahyudin mendapat pengalungan kain tenun Nusa Tenggara Timur dari Ketua Yayasan Uyelindo Tarsius Tukang.

Kehadiran Mahyudin di kampus STIKOM Uyelindo untuk melaksanakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3, yaitu

menyosialisasikan empat pilar MPR. Hari itu, 400 peserta sosialisasi yang terdiri atas ara mahasiswa STIKOM Uyelindo, anggota organisasi kepemudaan, dan siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas di Kota Kupang siap menerima materi sosialisasi. Selain Mahyudin, hadir dua anggota MPR sebagai narasumber, yaitu Zulfadli dari Fraksi Golkar dan Abraham Liyanto dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Dalam pidatonya, Wahyudin mengingatkan sosialisasi empat pilar yang dilaksanakan ini adalah salah satu upaya mengantisipasi adanya ancaman, baik internal maupun eksternal. “Kita menyadari ancaman kebangsaan itu tidak pernah selesai. Setiap saat selalu ada yang mencoba merongrong Indonesia. Mungkin karena mereka tidak suka melihat Indonesia bersatu, utuh, sebagai negara yang memang kaya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya,” ujar politikus Partai Golkar ini.⁶

Jadi, menurut Mahyudin, kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri, lalu siapa lagi yang akan menjaganya. Salah satu caranya memberikan pemahaman Pancasila atau empat pilar MPR ini.

“Pancasila atau empat pilar ini penting ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan generasi muda, agar dijadikan perilaku dalam kehidupan berbangsa serta bernegara,” katanya. Salah satu dari sekian banyak ancaman adalah adanya upaya me mecah-belah bangsa Indonesia.

“Kita tidak menuduh, tapi kenyataan itu memang ada,” ucapnya.

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1028143/sosialisasi-di-stikom-kupang-mahyudin-korupsi-harus-dihentika>

Sebab, orang melihat Indonesia yang terdiri atas ribuan suku bersatu dalam sebuah wadah Negara Kesatuan republik Indonesia sehingga ada yang mencoba memecah-belah Indonesia. Ancaman lainnya korupsi. Korupsi, kata Mahyudin, melibatkan pejabat tinggi negara sampai pejabat tingkat RT.

Karena itu, Mahyudin mengatakan korupsi harus dihentikan secara menyeluruh.

“Korupsi itu membahayakan karena bisa membuat negara menjadi collapse,” tuturnya.

Ia mecontohkan banyak negara lain yang tak bisa berkembang, yang akhirnya menjadi negara gagal karena korupsi. Karena itu, ucap Mahyudin, harus ada komitmen dari semuanya menghentikan praktik korupsi.

“Korupsi harus dijadikan musuh bersama.”

**BERHENTI
SALING
MENYAKITI
MULAILAH
SALING
MENGHARGAI**

*IMPLEMENTASI SILA KE-1 PANCASILA

INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

KETUA MPR HADIRI FESTIVAL KONSTITUSI DAN ANTIKORUPSI

Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyambut baik ‘Festival Konstitusi dan Anti Korupsi’ yang dilaksanakan di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin (24/10). Zulkifli menilai agenda ini sangat penting karena mengetengahkan tema besar gerakan anti korupsi.

Selama delapan belas tahun era reformasi, menurut Zulkifli, banyak kemajuan yang sudah dicapai bangsa Indonesia. Tetapi, reformasi juga memberikan dampak buruk berupa memudarnya nilai-nilai luhur keIndonesiaan.⁷

Zulkifli mengunjungi pameran perpustakaan yang masih satu rangkaian dari acara ‘Festival Konstitusi dan Anti Korupsi’. Pameran berlangsung di aula Baruga Petarani Unhas.

⁷ <http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/07/ovwvfm-zulkifli-hasan-jangan-sok-pancasila-kalau-masih-korupsi/mpr-ri/foto-mpr/16/10/24/ofxwp257-ketua-mpr-hadiri-festivalkonstitusi-dan-antikorupsi>

Acara 'Festival Konstitusi dan Anti Korupsi' terselenggara berkat kerjasama MPR, MK, KPK dan Unhas. Selain ketua MPR, acara tersebut dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu.

KETUA MPR BERSAMA KETUA MK DAN KPK TANDATANGANI DEKLARASI ANTI KORUPSI



Festival Konstitusi dan AntiKorupsi yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar, Senin (24/10/2016) tidak hanya diisi dengan dialog dan pameran saja, tetapi juga Deklarasi Anti Korupsi. Pada festival tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama pimpinan dua lembaga negara lainnya, yaitu

Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat dan Ketua KPK Ir. Agus Rahardjo, bersama Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu menandatangani deklarasi tersebut. Deklarasi Anti Korupsi berisi beberapa poin penting tentang pencegahan dan tekad berperan aktif meminimalisasi tindak korupsi di Indonesia.⁸ Salah satu poinnya adalah meny-

⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/18041541/ketua.mpr.bersama.ketua.mk.dan.kpk.tanda.tangani.deklarasi.anti.korupsi>

takan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa dan bertentangan dengan konstitusi.

Melalui penanda tangan deklarasinya tersebut, para pimpinan ketiga lembaga negara menyatakan kesungguhan dan tekad mewujudkan Indonesia yang memiliki sistem ketata negaraan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, juga berjanji untuk tidak menggunakan wewenang dan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Banyak yang sudah kita capai selama merdeka dan 18 tahun reformasi. Namun, satu hal menjadi catatan khusus yaitu disorientasi tujuan kemerdekaan dan lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila,” ujar Zulkifli. Ia berpendapat kondisi tersebut menyebabkan mental dan karakter Indonesia memudar. Tindakan seperti korupsi, menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi marak terjadi.

“Jika kita kembali ke tujuan awal kemerdekaan kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kembali ke nilai luhur Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup Insya Allah tugas KPK lebih ringan,” katanya.

Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat menyampaikan bahwa saat ini sudah saatnya semua elemen menyamakan persepsi bahwa korupsi bukan masalah hukum saja, tetapi sebuah kejahatan yang merusak sendi negara.

“Jangan penindakan saja yang gencar dilakukan tetapi pencegahan juga harus gencar,” katanya.

Saat ini penindakan korupsi di Indonesia memang cukup gencar dilakukan. Sejumlah operasi tangkap tangan dan tindak lanjut kasus yang sudah masuk ke persidangan juga terus dilakukan KPK.

Gencarnya penindakan korupsi ini juga cukup konstan jika dibandingkan dengan di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jika kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya penegakkan konstitusi semakin tinggi maka harapannya angka korupsi pun ikut terminimalisasi.

**STOP
MARAHAH-MARAHAH
MULAILAH
BERSIKAP RAMAH**

*IMPLEMENTASI SILA KE-2 PANCASILA

INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

KETUA MPR BUKA FESTIVAL KONSTITUSI DAN ANTI KORUPSI DI UNIVERSITAS HASANUDIN

Ketua MPR Zulkifli Hasan hadir di Aula Baruga Pettarani, Universitas Hasanudin, Makassar, untuk membuka Festival Konstitusi dan Anti Korupsi. Festival yang merupakan hasil kerja sama antara MPR, KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Universitas Hasanudin sebagai lembaga pendidikan tersebut digelar Senin (24/10/2016). Pembukaan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi dilakukan dengan pemukulan gendang oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua KPK Ir. Agus Rahardjo, dan Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu.⁹

“Saya rasa festival ini adalah agenda penting karena mengetengahkan sebuah tema besar yaitu gerakan anti korupsi,” ujar Zulkifli pada konferensi pers.

⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/18041541/ketua.mpr.bersama.ketua.mk.dan.kpk.tanda.tangani.deklarasi.anti.korupsi>

Zulkifli mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah 71 tahun mengecap kemerdekaan dan 18 tahun menjalani era reformasi. Begitu banyak kemajuan yang sudah dirasakan Indonesia namun nilai-nilai luhur Indonesia malah memudar.

“Bisa dilihat dari banyaknya orang lupa untuk apa dia jadi pejabat, yang tahu hanya bagaimana jadi kaya. Karena itu korupsi marak terjadi. Ini karena kita melupakan konsensus kebangsaan. Tujuan kita merdeka,” ujarnya.



Hal senada disampaikan juga oleh ketua MK Arief Hidayat.

“Kita sekarang mulai kehilangan visi nasional. Konstitusi sudah jelas bahwa korupsi adalah bentuk perampasan hak rakyat.

Karena itu kita perlu bersinergi untuk membangun kesadaran praktik bernegara yang baik," ujarnya.

Sementara Ketua KPK Ir. Agus Rahardjo mengatakan bahwa festival ini akan menjadi salah satu wujud menciptakan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda akan bahaya korupsi. KPK memiliki dua fungsi yaitu pencegahan korupsi dan penindakan. Jika kesadaran akan bahaya korupsi tinggi diharapkan pencegahan dapat berjalan lebih maksimal dan tindak korupsi dapat berkurang.

Festival Konstitusi dan Anti Korupsi juga diwarnai dengan dialog terbuka antara mahasiswa dengan para pimpinan lembaga tinggi negara tersebut. Selain itu juga Pameran Konstitusi dan Anti Korupsi.

Pameran diisi oleh MK yang memamerkan inovasi baru dalam menciptakan transparansi persidangan, komunitas Perempuan Anti Korupsi, serta MPR yang melaporkan kegiatan sosialisasi dan penerapan Empat Pilar MPR RI.

Pada kesempatan tersebut Ketua MPR, Ketua MK, Ketua KPK, dan Rektor Universitas Hasanuddin juga menandatangani deklarasi anti korupsi.

"Ini momentum yang bagus karena yang dibicarakan ini sifatnya mendalam soal korupsi dan konstitusi. Korupsi ini adalah persoalan dan musuh bersama. Korupsi ini dapat dicegah melalui penanaman nilai-nilai, sehingga ini jadi sinergi antara Empat Pilar MPR sebagai ideologi dengan pencegahan korupsi," tambah Sesjen MPR RI Ma'ruf Cahyono.

**BERHENTI
MEMAKSAKAN
MULAILAH
BERKORABAN**

*IMPLEMENTASI SILA KE-3 PANCASILA

INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

TIGA PIMPINAN INSTITUSI NEGARA DEKLARASIKAN ANTI KORUPSI

Tiga pimpinan Institusi penegak hukum mendeklarasikan anti korupsi di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin. Tiga pimpinan tersebut yakni Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat.

Menurut Zulkifli Hasan, selama 18 tahun era reformasi konstitusi di Indonesia telah mengalami penurunan terhadap nilai-nilai luhur dalam mengemban tugas yang amanah yang seharusnya.

Selain itu banyak yang bekerja sebagai pejuang rakyat, tetapi hanya memikirkan bagaimana untuk memperkaya diri tanpa menghiraukan tugas utamanya sebagai wakil dan pemimpin rakyat, hal itu dianggap berperilaku koruptif.

“Sudah 18 tahun kita reformasi. Kami di MPR menilai tentang nilai-nilai luhur ke Indonesiaan sudah mulai memudar,” katanya

Ketika jadi bupati, lanjut dia, akan seperti apa, menjadi anggota DPR itu seperti apa, menjadi camat itu pun seperti apa bahkan menjadi pejabat.¹⁰ Para oknum hanya ingin memperkaya diri dan golongannya saja seperti dikutip Antara. Zulkifli menjelaskan bahwa dalam kegiatan yang membahas tentang isu orientasi terkait dengan gerakan anti korupsi, merupakan salah satu cara untuk mengembalikan nilai luhur yang telah mulai pudar itu.

Melalui dialog anti korupsi dirinya berharap dapat menghasilkan suatu jawaban dan ide serta gagasan untuk mengembalikan citra nilai luhur ini yang semakin jauh dari permasalahan korupsi. Sementara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arif Hidayat mengemukakan untuk mendidik masyarakat di Indonesia agar jauh dari tindakan korupsi, harus dimulai dari pendidikan yang baik. Pihaknya berharap agar mahasiswa turut berperan dalam mengawal tindakan-tindakan yang berindikasi terhadap sifat korupsi, Kolusi, dan Nepotisme termasuk tindakan Pungutan Liar.

“Saat ini kita sudah masuk dalam dunia modern, untuk itu harus mengedepankan nilai keadilan, menjadi pejabat jangan berpikir untuk memperkaya diri akan tetapi berpikir memakmurkan masyarakat,” papar dia dihadapan ratusan mahasiswa.

Menurut dia diawali dari pendidikan anti korupsi sejak awal khususnya di tingkatan mahasiswa, langkah kerja sama sosialisasi dan

10 <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3743-tiga-pimpinan-institusi-negara-deklarasikan-anti-korupsi>

pendidikan tentang korupsi dapat dicegah diawal sebelum menjadi pejabat atau pimpinan negara.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk melihat tujuan masyarakat hidup bernegara sesuai dengan amanah konstitusi.

Terkait dengan banyak anggapan KPK tebang kasih dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku-pelaku korupsi, kata dia menanggapi bahwa KPK selalu melihat data dan fakta setiap objek yang menjadi fokus penyelidikan.

Pria berlatarbelakang insinyur ini menambahkan bahwa KPK terus melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus lain yang terindikasi tindakan korupsi di dalamnya.

“Mari kita melihat tujuan kita bernegara, KPK melihat data dan fakta dalam melakukan penyidikan kepada setiap pelaku, kita akan mengkaji terus terhadap kasus-kasus lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Rektor Unhas, Dwia Ariestina Palabuhu memberikan apresiasi besar atas kegiatan yang digelar di kampusnya apalagi membahas isu dan permasalahan besar yang dialami Indonesia. Menurut dia kegiatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang diselenggarakan atas kerjasama MK RI, MPR RI dan KPK ini sangat tepat digelar di Unhas karena mahasiswa unhas jauh dari tindakan korupsi.

“Kami memberikan apresiasi dan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini di Unhas dan sudah tepat, hal itu dikarenakan Unhas melahirkan alumni-alumni yang cendikia serta jauh dari korupsi,” tuturnya.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi akan sosialisasi edukasi tentang bahaya korupsi terhadap mahasiswa-mahasiswa tuntas brantas korupsi. Unhas dan kepada peserta lainnya, hal tersebut merupakan salah satu cara merubah budaya dan perbuatan korupsi tersebut sejak dini.

KETUA MPR TERIMA KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTI KORUPSI

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyambangi kantor Ketua MPR Zulkifli Hasan. (Liputan6.com/Johan Tallo) Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyambangi kantor Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), PP Pemuda Muhammadiyah, Indonesia Parliament Center, Change, YLBHI, dan PSHK itu meminta dukungan Ketua MPR agar menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Koalisi dari banyak LSM dari ICW, IPC, Perludem, Pemuda Muhamaddiyah, meminta dukungan juga dari aspirasi masyarakat sipil untuk menolak revisi UU KPK. Walaupun menunda, tapi ini (revisi UU KPK) seperti bom waktu,” ungkap Koordinator ICW Ade Irawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (24/2/2016).



Ade mengatakan setelah para anggota koalisi membaca draf revisi UU KPK, ada poin-poin yang justru akan melemahkan KPK.

“Seperti dewan pengawas bisa ganggu independensi KPK, juga izin pengawasan bisa memperlemah KPK, lalu juga SP3. Kami tidak alergi untuk revisi selagi tujuan memperkuat KPK,” ucap Ade.

“Kami ingin ada dukungan dari Ketua MPR sekaligus Ketua PAN. Kami juga akan serahkan petisi masyarakat yang bukan hanya dari kami saja tapi publik juga ikut mendukung,” lanjut dia.

Selain itu, perwakilan dari petisi *online Change* menyerahkan 60.000 dukungan masyarakat menolak revisi UU KPK.

“Petisi mengenai revisi UU KPK dimulai oleh Suryo Bagus. Dimulai tahun lalu yang dukung ! 30.000 orang. Tapi ini terus bergulir, dari 12 poin jadi hanya 4 poin. Dan sampai tahun ini ada 60. 000

dukungan. Ini menjadi salah satu petisi yang paling besar,” terang perwakilan ICW Arief.

Zulkifli Hasan pun langsung menanggapi. Dia menegaskan jika dari awal partainya, PAN, sejalan dengan KPK. Meski begitu, PAN tetap menghargai kritikan-kritikan dari masyarakat.

“Pimpinan KPK dulu setuju dengan 4 poin revisi UU KPK. Pertama perlunya dewan pengawas, kedua penyadapan harus izin pada pimpinan KPK, ketiga perlunya penyidik independen karena ada keputusan praperadilan ada yang boleh ada yang gak boleh diberi tahu ke publik, dan keempat soal SP3 ada yang layak untuk dihentikan seperti meninggal. Itu sejarahnya,” ucap Zulkifli.

Dia menyampaikan posisi PAN yang sudah bergabung dengan pemerintah ini harus mendengar suara rakyat. Oleh karena itu, PAN akan ikut dengan apa yang dikatakan oleh KPK.

“Saya sampai kapan enggak berubah. Saya ikut apa kata KPK. Keputusan sekarang menunda, sampai kapan saya belum tahu. Keputusan kami, PAN terutama, kita akan ikut apa keputusannya KPK,” Zulkifli menandaskan.

**BERHENTI
SILANG PENDAPAT
MULAILAH
MENCARI MUFAKAT**

*IMPLEMENTASI SILA KE-4 PANCASILA


INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

MADRASAH ANTI KORUPSI

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang menginisiasi berdirinya madrasah anti korupsi untuk menyegarkan pikiran para penegak hukum yang terbiasa menangani kasus korupsi.



Menurut Hidayat, pihak yang berwenang harus selalu dipantau dan disegarkan pikirannya agar profesinya tidak dimanfaatkan para koruptor untuk berlindung.

“Penegak hukum juga perlu dikawal agar mereka senantiasa mampu menciptakan keadilan. Bukan malah lesu karena terlalu

banyak menangani kejahatan, termasuk korupsi”, kata Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Ruang kerja Ketua MPR, Jakarta, Kamis.

Hidayat kemudian memberikan contoh sejumlah kasus korupsi yang belum terselesaikan antara lain kasus BLBI, dugaan penerimaan kompensasi reklamasi sebesar Rp 1,7 triliun, hingga kasus pembelian tanah Sumber Waras.

Pada kesempatan itu delegasi PP Pemuda Muhammadiyah yang dipimpin Bendahara Umum Abdul Rahman Syahputra Batubara juga mengundang Hidayat Nur Wahid untuk menghadiri acara Pra-Tanwir Pemuda Muhammadiyah yang akan digelar pada akhir November.

Hidayat menjawab undangan itu dengan menyatakan bersedia hadir dan menjadi pembicara pada acara pra tanwir dengan tema Etika dan Komunikasi kepemimpinan nasional.

“Tema itu menarik dan sesuai dengan era kekinian. Sewajarnya semua pemimpin memiliki etika, seperti yang ditunjukkan para pemimpin masa lalu. Mereka berdiskusi dan berdebat tapi tetap dalam koridor bahasa yang santun. Tidak kasar, apalagi sampai mengeluarkan isi kebun binatang”, pungkas Hidayat Nur Wahid.

AKHIRI AKTIVITAS KORUPSI DALAM DEMOKRASI

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyerukan kepada berbagai pihak untuk dapat mengakhiri aktivitas korupsi dalam rangka mengembangkan demokrasi Indonesia yang sehat dan terbebas dari beragam bentuk politik uang.

Zulkifli Hasan meyakini bahwa demokrasi tanpa korupsi bisa terwujud dengan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Dalam dua minggu banyak kepala daerah ditangkap KPK. Kenapa? Karena sekarang semuanya diukur dengan uang. Mari segera akhiri itu semua,” tegas dia dalam rilis, Jumat (29/9).

Ketua MPR juga menegaskan pendiriannya untuk mendukung penguatan dan perbaikan KPK dan menyatakan keberadaan komisi antirasuah tersebut tetap dibutuhkan bangsa.

Sebagaimana diwartakan, tingkat daya saing Republik Indonesia dapat berpotensi untuk meningkat pesat bila permasalahan terkait korupsi dan birokrasi dapat diatasi dan dibenahi dengan benar dan baik.

“Masalah korupsi dan birokrasi menjadi dua hal utama yang selalu dikeluhkan oleh banyak pihak,” kata peneliti lembaga Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (28/9).

Menurut Syarif, mengatasi aktivitas korupsi dan hambatan dalam birokrasi seharusnya merupakan pekerjaan rumah serius dan utama yang harus dituntaskan pemerintah. Apalagi, ia mengingatkan bahwa laporan Indeks Daya Saing Global (GCI) menunjukkan bahwa daya saing Indonesia mengalami stagnasi selama tiga tahun terakhir.

Dia mengatakan, pada tahun 2014 daya saing Indonesia berada pada peringkat 34 dan melorot ke peringkat 36 pada tahun 2017, dan jika dibandingkan tahun 2016 lalu, memang ada sedikit perbaikan atau naik 5 peringkat.

“Tetapi hal itu lebih seperti penebusan karena memburuknya daya saing nasional semenjak tahun 2014 lalu,” papar Syarif.

Selain itu, ujar dia, dalam meningkatkan daya saing, pemerintah juga diharapkan dapat memperhatikan parameter kesehatan dan pendidikan dasar. Kemudian, lanjut dia, isu isu fleksibilitas upah dan partisipasi perempuan juga perlu menjadi perhatian karena tingkat partisipasi tersebut juga sudah mengalami stagnansi selama beberapa tahun terakhir.

KETUA MPR DITEMUI KOALISI ANTIKORUPSI: SAYA IKUT KPK

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menerima kunjungan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di komplek gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (24/2/2016). Koalisi tersebut terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Pemuda Muhammadiyah, Indonesia Parliament Center, Perludem, Change, Transparency International Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, dan Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia.

Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan koalisi datang ke MPR untuk meminta dukungan Zulkifli dalam upaya menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹

Kami meminta dukungan untuk 12 mendukung aspirasi masyarakat sipil untuk menolak revisi UU

¹¹ <https://www.suara.com/news/2016/02/24/142619/ketua-mpr-ditemui-koalisi-antikorupsi-saya-ikut-kpk>

KPK, tapi menunda revisi tidak selesai malah menunda masalah, ini nanti akan menjadi bom waktu,” ujar Ade di ruang kerja Ketua MPR.

Ade menegaskan empat poin yang masuk dalam rancangan revisi UU KPK dapat melemahkan KPK. Misalnya, pembentukan dewan pengawasan, ini bisa mengganggu independensi. Kemudian poin penyadapan, katanya, bisa membuat kinerja KPK lemah. “Kami tidak alergi revisi UU KPK selama untuk memperkuat KPK, yang kami baca malah sebaiknya. Kami yakin pak ketua MPR mempunyai komitmen melawan korupsi dan kami ingin minta dukungan untuk menolak revisi UU KPK,” katanya. Ketua MPR mengikuti kemauan KPK dalam revisi UU KPK. Yakni di luar empat poin yang disepakati pemerintah dan DPR.

“Saya selalu katakan, saya ikut pemakai UU yakni KPK. Saya sudah bergabung dengan pemerintah jadi kita harus hormati, revisi sampai kapan ditunda, kita belum tahu. Kita akan tetap akan ikut keputusan KPK,” kata dia.

Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR sepakat menunda pembahasan mengenai revisi UU KPK, Senin (22/2/2016). Kesepakatan dicapai dalam pertemuan konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Presiden minta agar sebelum direvisi, disosialisasikan dulu.

Penundaan ini tidak memuaskan kalangan antikorupsi karena suatu hari nanti revisi UU KPK akan dilanjutkan lagi.

RAKYAT DAPAT CEGAH KORUPSI

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan rakyat dapat mencegah praktik korupsi secara aktif dengan cara memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas tinggi.

“Dalam konstitusi Indonesia mengamanahkan bahwa kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Karena itu, rakyat Indonesia dapat menjadi bagian dari pemutus lingkaran praktik korupsi,” kata Hidayat Nur Wahid¹² pada forum Konvensi Anti Korupsi II dan Sosialisasi Empat Pilar 13 MPR dengan tema “Integritas dan Produktivitas Kaum Muda untuk Keadilan Sosial” di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu.

Diskusi tersebut, juga menghadirkan pembicara lainnya yakni, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mustafa

¹² <http://id.beritasatu.com/home/hidayat-nur-wahid-rakyat-dapat-cegah-korupsi/161366>

Kamal, serta Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Hidayat Nur Wahid, dalam konteks sosialisasi Empat Pilar MPR RI, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanahkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga rakyat yang berdaulat sepatutnya dapat menjadi bagian dari arus utama anti-korupsi, jika rakyat menyadari kedaulatannya.

“Rakyat yang berdaulat, sepatutnya dapat melakukan koreksi dengan memilih pemimpin amanah dan berintegritas tinggi, baik di tingkat pusat dan daerah, yakni pemimpin yang komit untuk membangun bangsa dan negara bukan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri,” katanya.

Menurut Hidayat, memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas tinggi melalui pilkada yang transparan, jujur, dan berkualitas.

Hidayat mencontohkan, pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Di Gunung Kidul terpilih tokoh Muhammadiyah yang miskin menjadi kepala daerah, kemudian di DKI Jakarta terpilih pemimpin yang sederhana.

“Padahal, pada dua pilkada tersebut diwarnai praktik politik uang,” katanya.

Menurut Hidayat, rakyat sepatutnya dapat menjadi bagian dari pemutus lingkaran praktik korupsi Kalau praktik korupsi itu terkait

dengan kekuasaan, kata dia, maka ternyata kekuasaan itu dapat dikoreksi. Pada kesempatan tersebut, Hidayat juga memuji program Pemuda Muhammadiyah yakni Madrasah Anti Korupsi.

Jika masyarakat teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak pada mereka yang anti-korupsi, kata dia, maka rakyat tidak mungkin memilih pemimpin yang korup.

“Fatsun politik mengatakan Anda siapa maka itulah yang menjadi pemimpin Anda. Kalau Anda anti-korupsi, kalau mayoritas rakyat Indonesia anti-korupsi, maka Anda dan rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang anti korupsi,” katanya.

**BERHENTI
MALAS
MULAILAH
BEKERJA KERAS**

*IMPLEMENTASI SILA KE-5 PANCASILA

INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

KETUA MPR, KETUA MK DAN KETUA KPK TANDATANGANI DEKLARASI ANTI KORUPSI



Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dwia Aries Tina Pulubuhu menandatangani Deklarasi Anti Korupsi, di Kampus Unhas, Makassar, Senin (24/10).

Penandatanganan Deklarasi Anti Korupsi tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang digelar di Kampus Universitas Hasanuddin tersebut. Kegiatan lainnya pameran Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi, Talkshow Konstitusi dan Korupsi dengan pembicara Ketua MPR, Ketua MK dan Ketua KPK.

Deklarasi yang mereka tandatangani itu berisi pernyataan sikap mereka bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, merampas hak dan menyengsarakan rakyat Indonesia serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Untuk itu kami selaku penyelenggara Negara, mengutuk setiap perilaku koruktif dan bertekad mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” bunyi deklarasi ditandatangani Ketua MPR, Ketua MK dan Ketua KPK serta Rektor Unhas itu.

Untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi tersebut dengan menciptakan system kenegaraan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismen. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Tidak meminta dan menerima pemberian yang tidak sah. Mereka juga menyatakan siap dengan konsekuensi hukum yang dihadapi jika melakukan perbuatan korupsi yang tidak terpuji itu.

Zulkifli Hasan dalam sambutannya menilai bahwa selama 18 tahun reformasi berjalan, sudah banyak terjadi kemajuan. Namun menurut dia ada salah satu catatan khusus yang harus mendapat perhatian, yaitu masalah korupsi.

“Terjadinya kasus korupsi itu karena nilai-nilai kebangsaan kita semakin memudar,” katanya.

Sekarang kata Zulkifli Hasan banyak orang yang tidak tahu untuk apa menjadi gubernur, bupati dan walikota, anggota DPR dan jabatan lainnya.

“Banyak mereka menganggap menjadi pejabat jalan pintas untuk mencari kekayaan dan menjadi raja,” kata mantan Menteri

Kehutanan itu di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Pada hal, ulas Zulkifli Hasan, dalam terori kekuasaan berdasarkan konstitusi demokrasi Pancasila, yang berdaulat itu adalah rakyat dan kedaulatan itu diwakili oleh pejabat negara, anggota dewan karena tidak bisa semua rakyat memimpin.

Sebelum menjalankan jabatan, kata Zulkifli, seorang pejabat disumpah agar taat pada konstitusi.

“Seharusnya kita menjaga perilaku Pancasila, perilaku-prilaku yang penuh etika dan saling membhormati, musyawarah mufakat, sehingga tercapai adil dan beradab,” kata Ketua Umum PAN itu.

Menurut Zulkifli, jalan untuk mencapainya adalah kembali pada tujuan Indonesia merdeka. Kembali pada konstitusi, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Kalau sudah sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup, dia optimis tugas KPK akan lebih ringan.

“Sekarang ini mengapa tugas kita berat karena kita meninggalkan nilai-nilai luhur kebangsaan, dan ke-Indonesiaan kita. Demokrasi yang kita punya yang seharusnya menjaga nilai luhur Pancasila digembosi,” kata Zulkifli Hasan.

Sementara itu Ketua MK Arief Hidayat mengatakan menegaskan, korupsi apapun bentuknya bertentangan dengan konstitusi karena bertentangan dengan visi keadilan dan kesejahteraan sosial.

“Karena itu kita perlu bersinergi untuk menciptakan pemerintahan bebas korupsi dan transparan,” kata Arief.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan rasa optimisnya bahwa korupsi di negeri ini akan bisa dibasmi. Alasan karena tidak semua pejabat memiliki mentalitas buruk.

“Saya masih positif bahwa tidak semua pejabat memiliki mentalitas buruk. Masih ada pejabat dan PNS kita yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan Negara,” kata Agus Rahardjo optimis.

TOLAK REVISI UU KPK, KOALISI ANTIKORUPSI MINTA DUKUNGAN MPR

Organisasi yang terhimpun dalam Koalisi Antikorupsi seperti ICW, Perludem, IPC, TI, Change, YLBHI, PSHK, dan Pemuda Muhammadiyah menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Kamis, 24 Februari 2016.

Ade Irawan dari ICW sebagai ketua delegasi dalam pertemuan itu mengatakan, maksud kedatangan mereka menemui Zulkifli Hasan adalah untuk meminta dukungan dalam menolak revisi UU KPK. Meski diketahui revisi Undang-undang itu ditunda namun bagi mereka hal itu tidak menyelesaikan masalah.

Mereka meminta dukungan Ketua MPR sebab revisi yang hendak dilakukan bisa berujung pada pelemahan KPK. Pelemahan itu seperti adanya dewan pengawas yang

bisa mengganggu independensi KPK. Selain itu soal ijin penyadapan yang juga akan memperlemah KPK.¹³

Menurut Ade dirinya tidak alergi dengan revisi namun sepanjang revisi itu memperkuat KPK. Sayangnya revisi yang dilakukan akan memperlemah organisasi antirasuah itu. Koalisi itu yakin sosok Zulkifli Hasan, mempunyai komitmen untuk memperkuat KPK.

Disampaikan oleh anggota delegasi yang lain bahwa dinamika politik untuk memperlemah KPK bukan gejala baru, baik lewat DPR maupun MK. Diungkapkan bahwa DPR tak pernah mengawasi secara komprehensif sehingga arahnya ke mana tak jelas. Selama ini proses legislasi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka heran dalam negara demokrasi seperti ini, legislasi dilakukan secara tertutup. Disebutkan bahwa Indonesia sudah melakukan ratifikasi antikorupsi dengan demikian seharusnya Undang-undang Antikorupsi harus modern dan progresif. Termasuk dalam membuat Undang-undang Antikorupsi.

Diungkapkan bahwa mereka sudah memfasilitasi KPK untuk memberi contoh pemberantasan korupsi pada negara lain sebab banyak negara yang ingin belajar pada KPK. Dengan adanya revisi maka pemberantasan korupsi menjadi perhatian dunia. Dikatakan revisi KPK menjadi berita buruk di dunia internasional.

Diakui pernyataan Presiden soal revisi UU KPK hanya pernyataan semata sebab revisi UU KPK sampai saat ini masih di Prolegnas. Dengan masih di Prolegnas maka masih memberi kesempatan atau

13 <http://www.viva.co.id/berita/nasional/739848-tolak-revisi-uu-kpk-koalisi-antikorupsi-minta-dukungan-mp>

memberi peluang munculnya kembali untuk merevisi UU KPK. Dikatakan selama masih ada wacana revisi maka masyarakat masih resah. Keresahan sudah semakin nyata. Sudah ada petisi sampai 60.000 orang menolak revisi. Menurut mereka, masyarakat masih percaya KPK seperti sekarang.

Menanggapi hal yang demikian, Zulkifli Hasan mengatakan dirinya sejak awal mengikuti apa yang diinginkan oleh KPK. Kalau ada revisi menurut Zulkifli Hasan karena pada waktu yang lalu ada kesepakatan dengan pimpinan KPK.

Kesepakatan dengan pimpinan KPK dalam soal revisi menyangkut soal dewan pengawas, ijin penyadapan, penyidik independen, dan penghentian perkara SP3. Dalam perjalanan waktu, Zulkifli Hasan selalu menegaskan bahwa dirinya selalu menyatakan apa yang dimaui oleh KPK akan didukung.

Dalam masalah ini dirinya mengajak semua untuk menghormati apa yang ada. Dirinya mengatakan pernah bertemu dengan Presiden bahwa masalah revisi adalah masalah yang berlarut-larut dan membuang energi. Untuk itu dirinya berkata kepada Presiden agar Presiden, DPR, dan KPK bertemu dan membahas apa yang diinginkan.

Dan ternyata revisi ditunda. Dirinya menghormati apa yang dilakukan oleh Presiden itu meski demikian Zulkifli Hasan menegaskan kembali bahwa sikapnya tak berubah bahwa dirinya ikut

apa yang dimaui KPK. Apa yang bagus menurut KPK akan dimaui atau diikuti oleh Zulkifli Hasan.

“Kita akan ikut apa keputusan KPK,” ujar Zulkifli Hasan.

PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS KERUYOKAN

Wakil Ketua MPR Mahyudin menegaskan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Karena itu, juga dibutuhkan upaya hukum pemberantasan yang luar biasa.

“Namun, upaya pemberantasannya juga harus tepat, tidak tebang pilih, mau yang besar atau kecil kasusnya harus diselesaikan semua,” kata Mahyudin di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa 17 Oktober 2017.¹⁴

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menyoroti isu pembentukan Densus Antikorupsi oleh Polri. Dia setuju pembentukan Densus Antikorupsi selama sesuai aturan.

¹⁴ <http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/17/774475/pemberantasan-korupsi-harus-keroyokan>

“Lagipula, tugas pokok Kepolisian dan Kejaksaan memang tugasnya menindak kejahatan hukum, salah satunya kejahatan korupsi. Saya lihat bagus ya, karena kejahatan korupsi memang mesti dikeroyok, bergotong royong, memberantas kejahatan korupsi yang sudah akut oleh Polri, KPK, dan Kejaksaan. Itu poin besarnya,” ucapnya.

Polri berencana membentuk Densus Antikorupsi Polri. Wacana tersebut dikuatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan anggota Komisi III DPR. Tito menegaskan keseriusannya membentuk Densus Tipikor di bawah Polri.

PERKUAT KPK KETIMBANG BENTUK DENSUS TIPIKOR

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan lebih memilih untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi ketimbang harus membentuk Densus Antikorupsi seperti yang diinginkan Polri.¹⁵



Hal itu disampaikan Zulkifli menjawab pertanyaan wartawan soal wacana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi Polri.

“Mari kita memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, itu saja pernyataan saya,” ungkap Zulkifli kepada awak media di kawasan Kasablanka, Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2017.

¹⁵ <https://m.harianterbit.com/welcome/read/2017/10/22/88519/0/25/MPR-Pilih-Perkuat-KPK-Ketimbang-Bentuk-Densus-Tipikor>

Ketua Umum PAN ini mengatakan terhadap pernyataannya untuk memperkuat KPK tidak perlu diartikan lagi. Menurut dia dalam pernyataannya itu sudah jelas.

“Tidak pakai diartikan, mari kita perkuat KPK. Itu saja, tidak pakai tambahan lain,” ucapnya.

Menurut Zulkifli saat ini yang diperlukan hanyalah memperkuat KPK. Sebab, kata dia, lembaga lain seperti Kepolisian Republik Indonesia dan kejaksaan telah memiliki tugasnya sendiri-sendiri.

“Masing-masing sudah punya tugas, nah saatnya kita memperkuat KPK,” tuturnya dikutip tempo.co.

Usulan pembentukan Densus Antikorupsi ini disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR pada Selasa, 23 Mei 2017 lalu. Setelah itu, Tito terus mendesak pembentukan Densus Antikorupsi pada saat rapat dengan DPR.

Pada saat rapat dengan Komisi Hukum DPR, Kamis, 12 Oktober 2017 lalu, Tito berujar telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal rencana pembentukan Densus Antikorupsi.

Tito juga telah menyampaikannya rencana tersebut ke Presiden Jokowi dalam rapat paripurna dua bulan sebelum. Saat itu, kata Tito, Presiden Jokowi meminta Polri memaparkan konsep Densus Antikorupsi dalam rapat terbatas bila telah selesai konsepnya.

REFERENSI

<https://nasional.sindonews.com/read/1189883/13/tuntas-perkara-e-ktp-ketua-mpr-minta-kpk-profesional-1489985553>

<http://trijayafmplg.net/berita/2017/03/bkmss-komitmen-anti-korupsi-dan-implementasikan-pancasila-tuntas-brantas-korupsi-!!-dari-!6-43!>

<https://news.detik.com/berita/d-3351928/wakil-ketua-mpr-bicara-soal-korupsi-dan-kesenjangan-si-kaya-dengan-si-miskin>

<https://m.antaranews.com/berita/597523/wakil-ketua-mpr-korupsi-dipicu-gaya-hidup-hedonisme>

<http://makassar.tribunnews.com/2016/10/24/ketua-mpr-ri-mk-ri-kpk-deklarasi-anti-korupsi-di-unhas>

<https://nasional.tempo.co/read/1028143/sosialisasi-di-stikom-kupang-mahyudin-korupsi-harus-dihentika>

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/hu->

kum/17/09/07/ovwvfm-zulkifli-hasan-jangan-sok-pancasila-kalau-masih-korupsi/mpr-ri/foto-mpr/16/10/24/ofjxwp257-ketua-mpr-hadiri-festivalkonstitusi-dan-antikorupsi

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/18041541/ketua.mpr.bersama.ketua.mk.dan.kpk.tanda.tangani.deklarasi.anti.korupsi>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/18041541/ketua.mpr.bersama.ketua.mk.dan.kpk.tanda.tangani.deklarasi.anti.korupsi>

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3743-tiga-pimpinan-institusi-negara-deklarasikan-anti-korupsi>

<https://www.suara.comnews/2016/02/24/142619/ketua-mpr-ditemui-koalisi-antikorupsi-saya-ikut-kpk>

<http://id.beritasatu.com/home/hidayat-nur-wahid-rakyat-dapat-cegah-korupsi/161366>

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/739848-tolak-revisi-uu-kpk-koalisi-antikorupsi-minta-dukungan-mp>

<http://news.metrotvnews.com/read/2017/10/17/774475/pemberantasan-korupsi-harus-keroyokan>

<https://m.harianterbit.com/welcome/read/2017/10/22/88519/0/25/MPR-Pilih-Perkuat-KPK-Ketimbang-Bentuk-Densus-Tipikor>

INDEKS

A

Asian Games 2018 5

B

Biaya politik 8, 9

BKMSS 3

BLBI 36

C

Change 49

Collapse 15

D

Demokrasi politik 10

Densus Antikorupsi 53, 55

Donasi dari konstituen 8, 10

E

e-KTP 1

empat pilar MPR 14, 25

Empat Pilar MPR 9, 42

Pemuda Muhammadiyah 49

F

Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 17, 25

Formak 8

H

Hedonisme 9

I

ICW 39, 49

Ideologi 25

Indeks Daya Saing Global 38

Indonesia Corruption Watch 31

IPC 49

K

Koruptif 27

M

Mahkamah Kehormatan Dewan 1

MAKI 2

MD 3, 13

N

Nilai & pandangan hidup 5

O

Online Change 32

P

Pancasila 3, 14

Pancasilais 47

Pemilihan langsung 9

Pendidikan politik 37

Perludem 49

Pra-Tanwir Pemuda Muhammadiyah 36

PSHK 49

Pungutan Liar 28

R

Reformasi 7, 17, 46

S

Sendi negara 20

T

Tanah Sumber Waras 36

TI 49

U

Undang Nomor 17 Tahun 2014 13

Unhas 11

UU KPK 50

V

Visi nasional 24

Y

Yayasan Uyelindo Tarsius Tukang
13

YLBHI 49

TENTANG PENULIS

MA'RUF CAHYONO, mencintai literasi sejak remaja kini adalah Sekretaris Jenderal MPR RI yang peduli pada koleksi semantik yang terekam dengan sistematis dan berdaya guna dalam konteks Sumber Daya Informasi Legislatif. Lulusan Hukum Tata Negara, Doktor, menulis banyak buku bertema hukum tata negara dan politik yang ilmiah dan populer sejak lama.

SITI FAUZIAH, sehari-hari adalah Kepala Biro Humas yang memiliki talenta kehumasan natural-alami, luwes, santun namun kritis dan jeli serta cepat belajar di dalam segala bidang. Lulusan Ilmu Ekonomi ini piawai sebagai seorang public relation pemerintahan.

ROOSIAH YUNIARSIH, penulis 22 (dua puluh dua) buku nonfiksi, bekerja sebagai jurnalis pada koran Merdeka, Indonesian Observer dan Warta Ekonomi. Lulusan Ilmu Komunikasi - UI dan mengikuti kursus-kursus singkat teknologi informasi di Swinburne University of Technoogy, Australia.



FESTIVAL

PENGUATAN
KONSTITUSI &
PEMBERANTASAN
KORUPSI
2017

ISBN 978-602-73463-2-5



9

786027

348325